

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

1 2 3
HALA

Royal Doulton investasi US\$100 juta di migas

Oleh YUSUF WALUYO JATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Royal Doulton Co Ltd, produsen keramik terbesar dunia asal Inggris, berencana melakukan perluasan investasi ke sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

Untuk proyek tersebut, sedikitnya perseroan akan menanamkan modal sebesar US\$100 juta. Kemudian melalui anak usahanya APN (Australia Publisher News), Royal Doulton juga akan menjajaki bisnis teknologi informasi dan media cetak di Indonesia. Investasi di sektor ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar US\$20 juta.

Hal itu diungkapkan Ketua umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Achmad Widjaya, usai mendampingi Presdir Royal Doulton Tony O'Reilly bertemu dengan Menteri Perindustrian Fahmi Idris di Jakarta akhir pekan lalu.

"Dia [O'Reilly] berpikir Indonesia mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk menarik investor baru, cuma tidak dieksplorasi," ungkap Achmad.

Ketertarikan Royal Doulton masuk ke sektor migas nasional, ujar Achmad, dikarenakan potensi cadangan migas baik *off-shore* (darat) dan *onshore* (laut) di dalam negeri yang belum tereksplorasi besar.

Terlebih lagi, perusahaan asal Inggris tersebut juga memiliki sejumlah pengalaman mengembangkan lapangan migas di empat negara, yakni Meksiko, Nigeria, United Kingdom (UK), dan Afrika Selatan yang dikendalikan oleh anak usaha pertambangan mereka Providences Co.

Perluasan investasi itu, menurut Ach-

Profil perusahaan PT Doulton

Status	: PMA dengan komposisi: 95% Inggris/Royal Doulton Group 5% Multi Fortuna Group
Mulai berproduksi	: 1996 dengan nama PT Doulton Multifortuna 2002 berganti nama menjadi PT Doulton
Presiden komisaris	: Wayne Jonathan Nutbeen
Produk	: Keramik tableware (peralatan makan dan minum) Jenis Fine Ceramics dan Bond Ceramics Keramik hias (giftware)
Merek	: Royal Doulton dan Royal Albert
Kapasitas	: 7,50 juta buah per tahun

Sumber: PT Doulton, diolah

kebutuhan pasokan gas bagi pabrik keramik mereka di Indonesia. "Mereka juga merasa kewalahan untuk memperoleh pasokan gas bagi industrinya yang sudah ada disini," paparnya.

Jika rencana investasi tersebut jadi direalisasikan, tambah Achmad, maka Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi terbesar kedua Royal Doulton di sektor migas setelah Meksiko.

Untuk melakukan investasi di sektor usaha ini Royal Doulton akan membentuk anak usaha tersendiri dengan kepemilikan penuh saham. "Jadi bukan pola kemitraan seperti *joint venture*. Bagi mereka investasi sebesar itu, masih bisa dibbilang kecil."

Wilayah kerja eksplorasi migas yang mereka minati, menurut dia, ada di darat (*offshore*).

Sebelum menemui Menperin, jelas Achmad, pemegang saham Royal Doulton ini terlebih dahulu akan bertemu dengan Dirjen Migas Luluk Sumiarso. "Tujuan mereka menemui Pak Luluk untuk mengetahui gambaran rencana gas na-

sional. Bahkan Pak Luluk juga mendorong mereka untuk investasi di CBM (*coal bed methane*). Kalau mereka tertarik di CBM, maka akan mendapatkan kesempatan pertama," ujar Achmad.

Sekitar Agustus atau September 2007, kata Achmad, manajemen Royal Doulton akan kembali lagi ke Indonesia untuk membicarakan mengenai kelanjutan rencana investasi di sektor migas.

Dalam hal ini, sambungnya, Menperin telah berjanji untuk menjembatani dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro agar dipermudah segala proses birokrasinya.

Sektor media

Selain akan berinvestasi di sektor migas, lanjut dia, investor Inggris itu juga berencana menanamkan modalnya di bisnis media cetak dan elektronik. Di Australia, ungkap Achmad, keluarga O'Reilly telah memiliki jaringan bisnis media yakni Australia Publisher News.

"Mereka juga mau masuk di bisnis media dalam waktu yang bersamaan dengan investasi di sektor migas. Salah satu yang mereka pikirkan adalah untuk menggarap sektor media pertambangan yang saat ini masih belum tergarap optimal," papar dia.

Penjajakan investasi di media cetak oleh Royal Doulton, lanjut dia, telah dikonsultasikan lewat beberapa konsultannya di luar negeri dan memberikan berbagai masukan mengenai peluang dan tantangannya.

"Kalau masuk ke media elektronik seperti TV, dia [Doulton] mau yang bisa go *national* bukan hanya lokal. Tapi semuanya masih dalam tahap pertimbangan" (*yusuf.waluyo@bisnis.co.id*)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

Harga elpiji belum akan dinaikkan

JAKARTA: PT Pertamina belum akan menaikkan harga *liquefied petroleum gas* (elpiji) karena belum ada izin dari pemegang saham.

"Elpiji itu masalah sensitif. Selama ini kalo kita mau menaikkan harga selalu tidak ada *green light*. Kalau mau ada kenaikan harus melaporkan ke pemegang saham. Sampai sekarang belum ada *green light*," ujar Direktur Utama Pertamina Ari H. Soemarno di Jakarta, kemarin.

Menurut Ari, sebagai penjual pihaknya sebenarnya sangat ingin menaikkan harga terutama untuk memperbaiki keuangan perusahaan. Apalagi, kata dia, hingga akhir semester I 2007 perusahaan pelat merah itu telah merugi sebanyak Rp1,5 triliun bila harga berbasis pada harga pasar.

Dengan demikian, bila kenaikan tersebut benar-benar tidak terjadi tahun ini, Pertamina berpotensi mengulangi angka kerugian tahun lalu yang mencapai Rp2,9 triliun. Sedangkan angka kebutuhan elpiji domestik tahun ini diperkirakan sebanyak 1,1 juta ton.

"Pemegang saham juga harus mengerti kerugian bukan karena performa kita, tapi terjadi karena ada kebijakan bahwa harga tidak boleh naik," katanya.
(BISNIS/RAF)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : {

Penghapusan subsidi BBM dikaji

TAHUN 2007

Premium bisa terserah pasar

BISNIS INDONESIA

BOGOR: Demi mengurangi subsidi BBM, yang pada tahun anggaran 2007 mencapai Rp 61,83 triliun—lebih rendah daripada usulan pemerintah, sebesar Rp 68,5 triliun—harga premium mungkin diserahkan ke mekanisme pasar. Kajian tentang kemungkinan itu tengah dilakukan BPH Migas.

Harga pasar premium *real octan number* (RON) 88, dinilai sudah tidak berbeda jauh dengan harga pasar, yang berada pada kisaran Rp5.000 per liter. "Harga premium RON 88 tidak jauh beda dengan harga di pasaran," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di sela-sela sosialisasi tugas badan itu di Bogor, akhir pekan lalu.

Karena itu, dia mengakui BPH Migas tengah mengkaji hal tersebut. "Ya, BPH Migas tengah mengkaji melepas harga premium ke mekanisme pasar guna mengurangi subsidi BBM."

Bos Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) itu—yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai koordinator tim pengawasan dan penyediaan BBM—memberi contoh India yang telah melepas harga BBM premium sesuai harga pasar.

Anggota Pokja BBM BPH Migas Dedy Wijaya juga mengungkapkan hal yang sama. "Ada kemungkinan

penghapusan subsidi premium."

Namun, menurut Dedy, penghapusan subsidi minyak tanah belum bisa dilakukan, karena kebutuhan untuk bahan bakar itu masih banyak. "Kalaupun bisa, setelah 2010-2011."

Dedy memberi ancar-ancar waktu harga premium dilepas ke mekanisme pasar. "Penghapusan subsidi itu bisa dilakukan setelah 2009."

Tubagus mengatakan sejauh ini rendahnya daya beli masyarakat menyulitkan penghapusan subsidi untuk premium. "Kalau harga bensin Rp5.000 per liter, masyarakat akan teriak. Sebab kemampuan beli kita masih rendah. Kalau dilepas sesuai harga pasar, efeknya akan berantai."

Namun, jika pelepasan harga tersebut akhirnya dilakukan, maka harga premium akan disesuaikan dengan permintaan dan penawaran yang ada, "Sehingga di sini ada mekanisme *supply and demand*. Cuma butuh *poli-*

tical will," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi mendukung rencana pengkajian pencabutan subsidi itu. "Langkah itu bisa mengurangi pengeluaran belanja pemerintah."

Namun, menurut anggota Fraksi Partai Golkar itu, pemerintah harus mengkaji dengan akurat.

Anggota Komisi VII DPR Ade Daud Nasution mengemukakan kajian harus dilakukan secara benar. "Hal itu untuk melihat kondisi masyarakat, sehingga kebijakan itu menyentuh masalah yang sebenarnya," tutur anggota Fraksi Bintang Reformasi.

Vice President Government and Media Relations Total E&P Indonesia Ananda Idris mendukung jika ada kebijakan yang mendorong terjadinya mekanisme pasar.

Regulasi SPBU

Dedy menjelaskan penghapusan subsidi premium juga akan memu-

Subsidi BBM dan listrik (Rp triliun)

Jenis	2005	2006	2007	2008
BBM	95,6	60,55	61,84*	35,18
Listrik	10,54	27,52**	25,8***	25,96***

Sumber : Departemen ESDM 2007
Ket : 2005 dan 2006 : realisasi
2007 dan 2008 : target

*) Kurs : Rp9.300/US\$, ICP=US\$63/barel (2007) dan US\$54/barel (2008).
Volume BBM bersubsidi 36,91 juta kiloliter (2007), 37,90 juta kiloliter (2008)

**) Termasuk margin, ***) Tidak termasuk margin

BISNIS TUTUN PURNAMA

dahkan swasta membuka usaha SPBU tanpa harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan BPH Migas.

Pemerintah kabarnya tengah menyusun regulasi pendirian SPBU menyusul semakin jenuhnya SPBU yang ada di Jawa a.l. mensyaratkan pelaku usaha yang memiliki SPBU di Jawa untuk membuka di luar Jawa.

Sejauh ini, menurut Deddy, kalangan swasta

yang membuka usaha SPBU diwajibkan mengikuti ketentuan BPH Migas, karena menjual BBM bersubsidi. "Dengan dihapuskannya subsidi, badan usaha yang ingin mendirikan SPBU akan lebih mudah, tanpa harus memenuhi ketentuan BPH Migas."

Jenuhnya pasar SPBU lebih berhubungan dengan penyaluran BBM bersubsidi. Jika subsidi

BBM dihapus, BPH Migas tidak akan membuat regulasi yang mengatur keberadaan SPBU di suatu wilayah.

Masalahnya sekarang masih ada BBM PSO (*public service obligation*). "Kalau nanti sudah *nggak* ada, silakan mereka bersaing. Kalau mau berdekatan juga dipersilakan." (01) (*bisnis@redaksi.co.id*)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2007

PIPA KALTIM-JATENG

Hak Khusus Bakrie Tak Diputus

BOGOR (SINDO) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak akan memutus hak khusus pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Kalimantan Timur-Jawa Tengah (Kalim-Jateng) yang saat ini dipegang PT Bakrie & Brothers Tbk (Bakrie). Perusahaan dinilai sudah melakukan sejumlah kegiatan pembangunan ruas pipa sepanjang 1.219 km tersebut.

”Mereka sudah melakukan kegiatan pembangunan yang dimaksud seperti melakukan survei, pembebasan lahan, dan melakukan pendekatan dengan pemda (pemerintah daerah) setempat,” kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Cisarua, Bogor, kemarin.

Tubagus menambahkan, BPH Migas juga tengah melakukan sinkronisasi pembangunan antara pipa gas Kaltim-Jateng dengan ruas pipa Semarang-Cirebon yang dimiliki PT Pertamina (persero) dan ruas pipa Gresik-Semarang kepunyaan PT Rekayasa Industri. ”Kedua ruas ini penting bagi ruas pipa Kaltim-Jateng karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa,” tuturnya.

Mengenai kebutuhan pasok-

an gas yang akan dialirkan melalui ruas pipa Kaltim-Jateng, Tubagus pun mengatakan BPH Migas optimistis Bakrie dapat memperoleh pasokan gas sebanyak 700 juta kaki kubik per hari (*million standard feet per day*/MMSCFD) sesuai kebutuhan pada 2010. Hal itu didasarkan pada neraca gas yang dikeluarkan pemerintah belum lama ini yang memperkirakan Kaltim akan memiliki kelebihan gas pada 2010.

”Itu logikanya. *Kan* pipa selesai dibangun 2010, ketika selesai dibangun ada kelebihan gas di Kaltim sekitar 700 MMSCFD dan kebetulan itu sama dengan kebutuhan pipa,” ujarnya.

Namun, Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso mengatakan, pemerintah belum memutuskan mengenai penggunaan kelebihan gas sebesar 700 MMSCFD di Kaltim pada 2010 tersebut. Bahkan, kata dia, walaupun nantinya diputuskan gas tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri, belum ada keputusan pula apakah gas itu akan dialirkan melalui pipa atau ditransportasikan melalui kapal.

(ahmad senoadi)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR.DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			11 12 13 14 15		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN: 15.											TAHUN 2007

Petronas tak akan Tarik Investasi di Iran

KUALA LUMPUR—Memanasnya suhu geopolitik di Kawasan Teluk tak menyurutkan tekad perusahaan minyak nasional Malaysia, Petrolim Nasional Bhd (Petronas) untuk menanamkan modal di ladang minyak Iran. Petronas hingga kini bahkan terus menjajaki lebih banyak lagi kesepakatan di sektor hulu.

Presiden dan Chief Executive Petronas, Tan Sri Hassan Marican, menegaskan bahwa pihaknya tak akan menjual 10 persen saham yang dimiliki Petronas dalam proyek multi-miliar dolar pada proyek LNG Pars, yang dimotori Total—perusahaan minyak raksasa Prancis. Menurut Sri Hasan, Petronas dan Total akan mencapai kesepakatan

final pada megaprojek tersebut, tahun ini.

“Kami sangat senang. Kami telah berada di Iran sejak 1994,” ujar Hassan di Kuala Lumpur, pekan lalu. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat (AS) sempat mendesak pemerintah Malaysia agar menghentikan investasinya di Iran. Namun, desakan itu sendiri tidak digubris Kuala Lumpur, dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan investasi di republik Islam tersebut.

Senada dengan Petronas, pejabat perusahaan minyak asal Prancis, Total, juga menyatakan tak akan hengkang dari Iran. Meski tentu saja, sejak lama AS mendesak Prancis yang merupakan sekutunya itu untuk tidak me-

nanamkan modal di Iran. Total sendiri tetap menyatakan tak akan menggubris desakan itu. AS dan Uni Eropa sangat takut dengan program pengayaan nuklir yang tengah dikembangkan Iran. Padahal, berulang kali Teheran menyatakan bahwa program pengayaan nuklir itu dilakukan untuk pengadaan energi semata-mata.

Sebenarnya, dua tahun lalu Petronas sempat menguasai 20 persen saham di megaprojek kilang gas Pars LNG. Namun, saat ini separuhnya telah dilego Petronas. Kini, total saham yang dikuasai mereka hanya tinggal 10 persen. Petronas bertekad untuk tak menjual sisa sahamnya itu. Dalam megaprojek itu sendiri, perusahaan nasional

minyak Iran, National Iranian Oil Company (NIOC), mengendalikan 40 persen saham. “Iran adalah salah satu negara fokus yang telah kita identifikasi. Kita akan terus mengevaluasi peluang di sektor hulu di negeri itu,” ujar Hassan.

Berkaitan dengan Petronas, beberapa waktu lalu perusahaan itu meneken kesepakatan untuk memasok gas alam cair (LNG) ke perusahaan energi berbendera Jepang, Shikoku Electric Power Co Inc. Setiap tahun Petronas akan menyuplai 420 ribu ton LNG. Shikoku Electric merupakan perusahaan energi terbesar kedelapan di Jepang. Rencananya, perusahaan itu akan menggunakan LNG untuk memproduksi listrik. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR.DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 13										TAHUN 2007	

MIGAS

BPH Migas Kaji Aturan Pendirian SPBU

BOGOR (Media): Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengkaji dikeluarkannya aturan pendirian SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang ketat. Pengaturan tersebut untuk menghindari kejenuhan bisnis SPBU di satu wilayah tertentu.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengemukakan hal itu di sela Seminar Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPH Migas, di Bogor, akhir pekan lalu.

Tubagus mengambil contoh bisnis SPBU di wilayah Pulau Jawa yang kini mulai memasuki taraf jenuh. Salah satu penyebab jenuhnya bisnis SPBU kawasan tersebut karena letak antara satu SPBU dan lainnya saling berdekatan.

"Dalam jarak beberapa ratus meter, berdiri beberapa SPBU. Hal ini yang perlu dibenahi," tuturnya.

Penyebab lainnya, menurut Tubagus, pendirian SPBU tidak mempertimbangkan kepadatan penduduk dan jumlah mobil. Pendirian SPBU yang tidak beraturan itu menyebabkan usaha SPBU sulit balik modal karena margin keuntungan yang didapatkan kecil, hanya sekitar 4%.

Namun, ia mengingatkan meski bisnis SPBU di Jawa sudah memasuki masa jenuh, bukan berarti pendirian SPBU sudah terlalu banyak. Bahkan secara nasional, jumlah SPBU di Indonesia masih terlampau sedikit.

"Jika dibandingkan dengan India yang memiliki 34 ribu SPBU dan Thailand dengan 15 ribu SPBU, Indonesia baru memiliki sekitar 3 ribu SPBU. Jadi, sebenarnya SPBU di Indonesia masih kurang," paparnya.

Berdasarkan keterangan Ketua Pokja BBM BPH Migas Dedy Wijaya, saat ini 60% SPBU di Indonesia berada di Jawa. Dari total tersebut, SPBU Pertamina berjumlah sekitar 3.000, Shell sekitar 10 SPBU, dan Petronas sekitar 5 SPBU.

BPH Migas menargetkan hasil berbagai kajian infrastruktur dan aturan pendirian SPBU tersebut bisa mulai diterapkan BPH Migas pada 2008.

"Kajian infrastruktur hilir akan selesai akhir 2007 dan akan mulai berjalan tahun depan. Nanti butuh sekian SPBU, perlu sekian depo. Seluruh Indonesia ada kajiannya," kata Dedy. (Eva/E-4)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	<u>JUN</u>	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			11 12 13 14 15		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN: 14.											TAHUN 2007

Kajian *Market Rule* SPBU Selesai Akhir 2007

JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuat *market rule* pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hal ini terkait semakin banyaknya SPBU sementara jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan terbatas. BPH Migas menegaskan tidak akan ada SPBU yang ditutup.

"Jumlah BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah dibatasi karena kalau ditambah nanti pendapatan mereka menjadi kecil dan usaha ini tidak lagi menarik," kata Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, akhir pekan lalu.

Hasil kajian itu, jelasnya, baru akan selesai akhir 2007. Pemerintah menetapkan

jumlah premium (bensin) bersubsidi sebesar 17 juta kiloliter (kl) dan 14 juta kl solar pada 2007. Sejumlah inilah yang harus dialokasikan kepada SPBU-SPBU di mana sampai April 2007, realisasi pendistribusian BBM bersubsidi sebanyak 5,499 kl, minyak tanah 3,202 kl, dan solar 3,30 kl.

Anggota Pokja Wilayah I BBM BPH Migas Dedi Wijaya menambahkan *market rule* tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Dengan begitu, hasil pemhasannya bisa dibahas pemerintah untuk menjadi acuan pemberian izin pembangunan SPBU berikutan permintaan dan penawaran (*supply and demand*) setiap wilayah.

Market rule ini berisikan

jarak minimal dua atau lebih SPBU. Selain itu, juga perhitungan kebutuhan SPBU dan depo per wilayah dengan tujuan agar tidak terjadi upaya saling menjatuhkan harga. Soal aturan ini akan diterapkan sehingga berkorelasi terjadi penutupan SPBU yang saat ini jaraknya saling berdekatan, BPH Migas menegaskan tidak akan terjadi. "Jelas tidak akan dilakukan, karena akan merugikan pengusaha SPBU," kata Dedi.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pihaknya mengundang investor sebanyak mungkin untuk usaha hilir. Namun, usaha ini akan disebar ke wilayah lain, selain Jakarta. Dari lebih 3.000 SPBU di Indonesia, 60 persen terletak di Jawa sehingga sudah jenuh dan jika

bertambah tidak akan memberikan keuntungan.

Dijelaskan Dedi, saat ini badan usaha selain Pertamina yang membangun SPBU di Jakarta dan sekitarnya sedang melakukan publikasi. Mereka masih belum bisa menyaingi karena Pertamina masih diberi hak *Public Service Obligation* (PSO) BBM. Ini artinya, mereka belum bisa melakukan persaingan secara terbuka. ■ ria

Fakta Angka

17 Juta

Jumlah bensin yang disubsidi pada 2007, dalam kl.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN : B 2											TAHUN 2007																																		

Kun Kurnely, DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA EP:

Lapangan Minyak Produktif Tidak Ditawarkan

Direktur Utama PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Kun Kurnely mengungkapkan saat ini banyak pihak yang ingin melakukan kerja sama dengan perusahaannya untuk mengelola lapangan yang sudah berproduksi. "Tapi kami menolak dengan alasan Pertamina EP masih sanggup mengelola dan membiayainya," ujarnya kepada *Tempo*.

Berapa produksi Pertamina EP saat ini?

Tahun ini kami menargetkan produksi minyak mentah 117 ribu barel per hari. Tar-

get produksi akan naik pada 2008 menjadi 138 ribu barel, pada 2009 menjadi 189 ribu barel, dan 2010 menjadi 200 ribu barel. Untuk mencapai target tersebut, tahun ini kami menginvestasikan Rp 13,2 triliun. Tahun lalu total investasi kami Rp 8,7 triliun.

Lapangan mana saja yang dikelola Pertamina EP?

Kami membagi dalam lima grup. Grup I adalah lapangan yang kami kelola dan biayai sendiri, sedangkan grup II adalah lapangan yang kami kelola sendiri dan pembiayaannya bisa dilakukan

melalui pinjaman lembaga keuangan. Grup I dan II adalah lapangan produksi dan prospeknya sangat bagus. Kami menyatakan tidak akan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Adapun lapangan yang berada di grup III adalah lapangan marginal. Kami mengelolanya melalui pola kemitraan dengan pihak lain. Grup IV adalah lapangan yang berisiko. Untuk mengelolanya, kami mengajak pihak lain dengan melakukan kerja sama. Sedangkan Grup V adalah lapangan yang be-

risiko tinggi, yang akan kami lepas kepada investor lain.

Lapangan mana saja yang masuk grup I dan II?

Pondok Tengah dan Babelan di Bekasi, Jati Barang di Cirebon, serta lapangan lainnya di Jawa Barat dan Sumatera.

Investor mana saja yang mengajak kerja sama untuk mengelola Pondok Tengah?

Tawaran kerja sama sih banyak, tapi kami menolak dengan alasan Pertamina EP masih sanggup mengelola dan membiayainya. Lapangan yang berada di grup I dan II

tidak akan kami lepas kepada investor lain. Sebab, lapangan-lapangan tersebut merupakan lapangan prospektif dan menjadi sumber utama pendapatan Pertamina EP.

Bukankah dengan melakukan kerja sama akan menaikkan produksi?

Apa susahnya menaikkan produksi dari lapangan-lapangan di grup I dan II? Lapangan-lapangan itu sangat mudah dioperasikan dan berada di *onshore* (darat). Jadi tidak ada alasan buat kami untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Siapa saja investor yang mengajukan kerja sama? Kabarnya banyak yang dekat dengan penguasa?

Tawaran melakukan kerja sama datang dari banyak investor. Tapi kami menyatakan akan mengelolanya sendiri.

Apa kendala yang dihadapi Pertamina EP?

Kami masih kekurangan sekitar 400 sarjana teknik untuk bidang geologi, geofisika, perminyakan dan lainnya. Sarjana yang baru lulus kami gaji Rp 6-7 juta per bulan. ● ALI NUR YASIN

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR.DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2007

BBM BERSUBSIDI

Harga Premium Akan Mengikuti Pasar

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengkaji kemungkinan melepas harga premium RON (real octane number) 88, yang kini masih disubsidi, sesuai mekanisme pasar.

Rencana tersebut, merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi premium dan menghentikan penyelewengan peruntukannya selama ini.

Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dengan dibukanya pasar premium RON 88 tersebut akan mengatasi kelangkaan, karena dimungkinkan banyak perusahaan masuk ke bisnis premium. Sehingga konsumen diharapkan bisa mendapat harga murah meskipun tanpa subsidi.

Namun, Tubagus menggarisbawahi, rencana tersebut masih sebatas wacana dan kemungkinan baru bisa dilakukan setelah tahun 2009 mendatang. "Ini baru ide, belum sikap resmi BPH Migas. Di beberapa negara seperti India sudah dilakukan. BBM sejenis premium tergolong BBM yang tidak disubsidi sehingga beban subsidi pemerintah jadi lebih ringan," kata Tubagus usai sosialisasi peran dan

tugas BPH Migas di Jakarta, kemarin.

Tubagus mengatakan, sesuai tekad pemerintah, hingga tahun 2009, tidak akan menaikkan BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL). Selama ini penjualan premium RON 88 hanya dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).

Selain itu, Tubagus juga menegaskan, pasar premium RON 88 itu juga tidak sesuai peruntukkan karena dipakai kendaraan mewah yang seharusnya menggunakan angka oktan yang lebih tinggi. Premium dengan angka oktan lebih tinggi antara lain RON 92 seperti Pertamina dan RON 95 untuk Pertamina Plus.

"Ironis sekali, bila pemilik mobil-mobil mewah yang menikmati subsidi yang diperuntukkan untuk rakyat ini. Misalnya mobil-mobil mewah itu tidak mau pakai pertamax tapi dia pakai premium dicampur penambah oktan. Karena itu,

kita akan kaji agar tepat sasaran," kata Tubagus.

Dengan melepas premium ke harga pasar itu, menurut dia, pemerintah masih akan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat, yakni angkutan umum bisa tetap mendapat premium RON 88 bersubsidi.

Dengan cara mendirikan pompa bensin bersubsidi khusus di terminal, kata dia, maka akan memastikan bahwa penggunaan premium RON 88 tepat sasaran. "Tidak semua subsidi dihilangkan, tetapi akan lebih berkurang bila penggunaannya memang tepat, bukan digunakan selain peruntukannya," kata dia.

Terkait dengan rencana itu, BPH Migas juga akan meminta pelarangan penjualan bahan penambah oktan, karena tidak sesuai dengan prinsip pengurangan subsidi.

"Kalau saat ini, premium yang digunakan kendaraan mewah dicampur dengan penambah oktan. Sehingga perlu juga disikapi penjualan penambah angka oktan ini. Makanya sata bikin pernyataan oktan buster (penambah oktan-red) itu dihentikanlah dipro-

duksi karena tidak sejalan dengan program pengurangan subsidi," ujarnya.

Pembatasan SPBU

Pada kesempatan itu, Tubagus juga mengatakan, pihaknya akan membatasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khususnya yang letaknya berdekatan. Karenanya, BPH Migas akan mengeluarkan sebuah *market rule* dan kajian infrastruktur agar penyebaran SPBU lebih merata. "Kami khawatir dengan banyaknya SPBU akan membuat pengembalian modalnya menjadi lebih lama," katanya.

Menurut dia, selain soal kedekatan letak, pihaknya juga akan mengatur SPBU sesuai dengan kepadatan penduduknya. Saat ini, jumlah SPBU di Indonesia mencapai 3.500 unit.

Sementara itu, Ketua Pokja BBM BPH Migas Dedy Wijaya menjelaskan, saat ini 60 persen SPBU di Indonesia berada di Jawa. Dari total tersebut, SPBU Pertamina berjumlah sekitar 3000, Shell sekitar 10 SPBU, dan Petronas sekitar 5 SPBU. (Abdul Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR.DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS																																												
<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI																																												
<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 7																																												
TAHUN 2007																																												

>> KILAS TAMBANG

Blora Proyek Percontohan Gasifikasi

BOGOR - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menempatkan Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai proyek percontohan gasifikasi gas alam kota. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam acara Sosialisasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPH Migas periode 2003 - 2007 di Cisarua, Bogor, Sabtu (9/6), mengatakan, saat ini pihaknya melakukan pra-kualifikasi untuk menentukan siapa yang berhak melakukan kajian, sehingga kajian dalam tahap desain diharapkan bisa selesai akhir tahun ini. Gasifikasi ini dilakukan untuk mengganti penggunaan minyak tanah yang biasa dipakai masyarakat setempat ke gas alam di daerah tersebut. BPH Migas sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blora terkait perizinan dan kajian. "Hasilnya nanti akan menentukan bagaimana desain pipa yang harus dibangun hingga sistem pendanaannya," ujar Tubagus. (pya)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR.DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

PERDAGANGAN

Taiwan Minati Migas dan Kayu Indonesia

JAKARTA (Media): Indonesia membuka lebar pintu masuk bagi investor dari luar negeri. Sementara itu, Taiwan membutuhkan migas dan kayu Indonesia. Kedua komitmen itu merupakan salah satu hasil dari pertemuan 30 perusahaan asal Taiwan dengan sejumlah pengusaha Indonesia, awal bulan ini.

Ketua Komite Dagang Importir dan Eksportir Taiwan Wang Ching Sui dan Ketua Komite Taiwan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Agum Gumelar mengemukakan hal itu saat membuka pertemuan bisnis di Jakarta, akhir pekan lalu. Pertemuan serupa akan digelar Kadin Jawa Timur, di Surabaya, Senin (11/6).

Turut hadir dalam pertemuan akhir pekan lalu, Direktur Promosi Hubungan Luar Negeri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman dan Direktur Pusat Perdagangan Taiwan di Jakarta James KJ Chen.

Wang mengatakan kerja sama ekonomi antara Taiwan dan Indonesia meningkat signifikan periode lalu.

Karena itu, menurutnya, pertemuan dagang bilateral kali ini menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan volume investasi dan perdagangan antara Taiwan dan Indonesia.

"Dua bidang industri andalan Taiwan adalah informatika dan mekanika. Sebaliknya, Indonesia mempunyai bahan mentah yang diperlukan Taiwan," kata Wang.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Taiwan 2000-2006 menunjukkan kenaikan volume ekspor 8,4%. Di sisi lain, volume impor Indonesia dengan Taiwan menurun sebesar 2,16%. Sementara itu, total perdagangan Taiwan dengan Indonesia pada periode Januari-Desember 2005 mencapai US\$6,87 miliar (peringkat ke-12 dari nilai perdagangan Taiwan di dunia). Angka tersebut meningkat 15,01% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2004. (Zhi/E.2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2007

Biofuel Bukan Ancaman OPEC



BIOFUEL tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) karena biofuel hanya menyediakan porsi kecil dari permintaan ener-

gi global.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Energi Internasional (IEA) dalam wawancara yang dipublikasikan, Jumat. Komentarnya itu muncul setelah Sekretaris Jenderal OPEC Abdalla El-Badri mengatakan Rabu (6/6) bahwa cartel tersebut telah mempertimbangkan pengurangan investasi dalam produksi minyak baru dikarenakan pengembangan bio-fuels. "OPEC tidak pernah khawatir," kata pimpinan IEA, Claude Mandil kepada Financial Times. Sebanyak 12 negara produsen minyak OPEC telah memompa lebih dari sepertiga dari pasokan minyak mentah dunia. ●

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			11 12 13 14 15		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN: 7											TAHUN 2007

TAJUK UTAMA

Dilema subsidi

Ini kabar baru yang mengagetkan: Pemerintah mengkaji kemungkinan mencabut subsidi untuk bensin jenis premium. Semangatnya baik, menyehatkan anggaran. Tetapi hati-hati, semangat baik bisa berbuah 'bencana' manakala dilaksanakan dengan tidak bijaksana.

Jika itu terjadi, bisa jadi harapan baik saat ini berubah menjadi petaka. Betapa tidak. Tahun ini tampak di permukaan, dan sebagian kita rasakan, perekonomian mulai menggeliat; bergerak meskipun pelan. Pelan tetapi pasti.

Banyak kabar baik, sekalipun masih terselip kabar kurang baik. Kabar baiknya, fundamental ekonomi berangsur-angsur menguat, tampak dari inflasi yang terus menurun, neraca pembayaran cukup kuat, dan cadangan devisa menanjak. Juga harga komoditas menguat stabil yang pada akhirnya mendongkrak ekspor, investasi mulai muncul, dan pasar finansial bergairah dengan rekor-rekor baru, baik untuk kurs rupiah maupun indeks harga saham gabungan di

Bursa Efek Jakarta.

Meski sektor riil masih menjadi sorotan, nyatanya banyak perusahaan merealisasikan aksi korporasi mereka tahun ini, dalam bentuk penambahan modal maupun ekspansi usaha. Kinerja perusahaan pada kuartal I/2007 umumnya juga relatif membaik. Semua itu sesungguhnya mencerminkan perbaikan di mikro, mengiringi stabilitas makro yang cukup terjaga. Semua itu mengembangkan optimisme, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dipasang dengan perkiraan cukup tinggi, sekitar 6,2%.

Memang, masih terselip kabar yang kurang baik, seperti angka kemiskinan masih tinggi dan pengangguran belum sepenuhnya terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Kabar kurang enak lainnya adalah instrumen fiskal tetap saja mandul, belum sanggup menjadi andalan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Tetapi kabar kurang baik itu seolah-olah mendapatkan kompensasinya,

malahan seperti tenggelam di balik hiruk-pikuk indikator finansial yang terus-menerus membuat kejutan. Kini mulai muncul harapan agar indikator finansial yang kinclong itu, yang antara lain disumbang oleh arus deras modal portofolio—mencapai US\$52 miliar hingga Mei—dapat ditransfer ke pembiayaan usaha riil, manakala kian banyak perusahaan baik yang masuk bursa saham.

Karena itu, munculnya wacana mengenai rencana menghapuskan subsidi premium agak mengusik harapan yang mulai merebak tersebut. Pemerintah agaknya harus, tidak sekadar perlu, belajar dari pengalaman 2005. Ketika berwacana secara berkepanjangan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), lalu direalisasikan pada 1 Oktober. *Beleid* itu ternyata membawa implikasi ekonomi yang buruk, pukulan telak bagi perekonomian sepanjang 2006.

Meskipun, sekali lagi, semangatnya baik, mengurangi subsidi untuk menyehatkan APBN, *beleid* itu memukul telak sektor usaha. Langkah itu memang membuat APBN seolah-olah sehat, defisit berkurang, tetapi fungsi utamanya untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi tetap tidak berkembang. Di situlah sebenarnya kegagalan manajemen fiskal pemerintah kala itu.

Kita memahami di situlah pemerintah menghadapi dilema yang tidak mudah. Kini, wacana kenaikan harga bensin mulai muncul ke permukaan.

Kebiasaan buruknya, begitu berwacana, lalu berkepanjangan dan menjadi kontraproduktif. Kita tentu tidak ingin tercebur ke dalam polemik yang berlarut-larut. Sebab pada akhirnya dampak psikologisnya jauh lebih besar.

Ketika kenaikan harga akibat pencabutan subsidi benar-benar jalan, kerugian ekonomis jauh lebih besar ketimbang asumsi-asumsi yang sudah diperhitungkan. Kita tentu tidak ingin terantuk pada batu yang sama untuk kedua kalinya.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	<u>JUN</u>	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31							
HALAMAN: 68											TAHUN 2007

Penurunan harga minyak capai US\$2 barel/hari

BLOOMBERG

NEW YORK: Harga minyak mentah pada pekan lalu turun lebih US\$2 barel dari level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir, di tengah perhatian naiknya tingkat suku bunga yang akan memicu melambatnya pertumbuhan permintaan komoditas itu.

"Poin data ekonomi terbaru melambat, nilai imbal hasil obligasi bergerak dan terdapat risiko naiknya tingkat suku bunga. Melemahnya data ekonomi akan memengaruhi permintaan bahan bakar," kata Eric Wittenauer, analis energi A.G. Edward & Sons Inc, Saint Louis.

Harga minyak mentah untuk pengiriman Juli di New York

Mercantile Exchange turun US\$2,17 atau 3,2% menjadi US\$64,76 per barel. Harga itu merupakan level terendah sejak 31 Mei. Harga komoditas itu turun 0,5%, pada pekan lalu.

Harga minyak mentah jenis Brent untuk penyerahan Juli di pasar berjangka London turun US\$2,62 atau 3,7% menjadi US\$68,6 per barel.

Pemimpin Federal Reserve Bank Ben S. Bernanke pada 5 Juni memperkirakan bakal terjadi inflasi di AS. "Secara berangsur-angsur melunak, risiko akan ramalan menjadi terbalik."

Presiden Fed Cleveland Sandra Pianalto pada 6 Juni memprediksi sejumlah harga akan naik sangat cepat.

"Dengan adanya pembicaraan mengenai kenaikan suku bunga, hal ini akan mematikan pasar saham, para pedagang khawatir adanya pertumbuhan permintaan energi," kata Michael Fitzpatrick, Wakil Presiden Manajemen Resiko Energi pada Man Financial Inc, New York.

Sebelumnya *Associated Press* melansir angin topan Gonu yang merupakan badai paling kuat telah terjadi di sepanjang pantai Iran dan Oman.

"Ada kekhawatiran pada awal minggu, angin topan Gonu menerjang industri minyak Oman dan bergerak ke Arab Saudi," kata analis Energy Security Analysis Inc, Wakefield, Massachusetts, Rick Mueller. (08)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR.DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: B.2

TAHUN 2007

Bakrie Tetap Kuasai Pipa Kalimantan-Jawa

Proyek pipa gas Kalimantan Timur ke Jawa tengah tidak akan dibatalkan.

BOGOR — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tak akan melakukan lelang ulang atas badan usaha yang memegang hak khusus pemipaan gas Kalimantan Timur-Jawa Tengah. Pada Juli 2006, PT Bakrie & Brothers Tbk. memenangi lelang hak khusus pemipaan gas Kalimantan Timur-Jawa Tengah. BPH Migas memiliki kewenangan mencabut hak khusus apabila selama satu tahun tak ada kegiatan dalam proyek itu.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan periode hak khusus baru diperhitungkan sejak badan usaha mulai membangun dan mengembangkan proyek. Saat ini, kata dia, BPH

Migas selalu mendapatkan perkembangan upaya pembangunan yang dilakukan PT Bakrie & Brothers Tbk., PT Pertamina, dan PT Rekayasa Industri. "Mereka selalu memberikan laporan kegiatan," ujar Tubagus akhir pekan lalu.

PT Bakrie & Brothers menjadi pemenang lelang hak khusus proyek pembangunan transmisi gas bumi Kalimantan Timur-Jawa Tengah sepanjang 1.200 kilometer dengan nilai US\$ 1,258 miliar. Bakrie mengungguli PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan PT Barata Indonesia.

Proyek pemipaan gas itu ditawarkan pemerintah sejak Forum Infrastruktur I, Januari 2005.

Akhir 2006, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyatakan kemungkinan pembatalan proyek pemipaan karena produksi gas di Kalimantan cenderung turun. Dia khawatir, jika gas dikirim ke Jawa, hal itu akan me-

matikan kehidupan industri setempat.

Kalla yakin produksi gas dari Cepu dan lokasi lain di Jawa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa. Namun, pembatalan ini bergantung pada keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, BPH Migas tetap melanjutkan proyek tersebut. Menurut Tubagus, proyek pemipaan gas Kalimantan Timur-Jawa Tengah termasuk kategori proyek besar. Badan usaha dalam melakukan pembangunan bergantung pada kesiapan pemerintah. "Kami berharap pemipaan gas ini terealisasi, sehingga kondisi pasokan gas lebih andal," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan proyek pipa gas Kalimantan-Jawa tidak akan dibatalkan.

● YULIAWATI

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR.DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7		TAHUN 2007

MENCONTOH INDIA DAN VIETNAM

Dikaji, Premium RON 88 Sesuai Harga Pasar

BOGOR – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengkaji kemungkinan melepas harga premium dengan *real octane number* (RON) atau berangka oktan 88 yang kini masih disubsidi, sesuai mekanisme pasar. India dan Vietnam telah menerapkan premium jenis ini sesuai harga pasar

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di sela Sosialisasi Tugas BPH Migas di Cisarua, Bogor, Sabtu (9/6), mengatakan, pembukaan pasar premium RON 88 tersebut merupakan upaya mengurangi subsidi premium, sekaligus perbaikan lingkungan.

Menurut dia, pembukaan pasar tersebut juga akan mengatasi ke-

langkaan dan sekaligus penyelewengan yang terjadi selama ini. Namun demikian, rencana tersebut masih sebatas wacana dan kemungkinan baru bisa dilakukan setelah 2009.

“Sesuai tekad pemerintah, hingga 2009 tidak akan menaikkan bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL). Namun, kita bisa mencontoh penerapan harga premium RON 88 seperti di India dan Vietnam,” ujar Tubagus.

Tubagus menegaskan, dengan pemberlakuan harga pasar, dimungkinkan banyak perusahaan masuk ke bisnis premium RON 88, sehingga konsumen diharapkan bisa mendapat harga murah. Selama ini, penjualan premium

RON 88 hanya dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).

Dia juga mengatakan, pasar premium RON 88 itu juga tidak sesuai peruntukan, karena dipakai kendaraan mewah yang seharusnya menggunakan angka oktan yang lebih tinggi. Premium dengan angka oktan lebih tinggi antara lain RON 92 seperti Pertamax dan RON 95 untuk Pertamax Plus.

Namun, menurut dia, angkutan umum bisa tetap mendapat premium RON 88 bersubsidi dengan cara mendirikan pompa bensin bersubsidi khusus di terminal. Terkait dengan rencana itu, BPH Migas akan meminta pelarangan penjualan bahan penambah oktan, karena tidak sesuai dengan prinsip

pengurangan subsidi.

SPBU Dibatasi

Pada kesempatan itu, mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu juga mengatakan, pihaknya akan membatasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khususnya yang letaknya berdekatan.

“Kami khawatir dengan banyaknya SPBU akan membuat pengembalian modalnya menjadi lebih lama,” katanya.

Menurut dia, selain soal kedekatan letak, pihaknya juga akan mengatur SPBU sesuai dengan kepadatan penduduknya. Saat ini, jumlah SPBU di Tanah Air mencapai sekitar 3.500 unit. (pya)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B.7.

TAHUN 2007

Pasar SPBU Akan Diatur

BOGOR — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyusun aturan pasar (*market rule*) bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jumlah SPBU di Tanah Air dinilai sudah sangat banyak, yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Bukan dibatasi. Kami mau buat *market rule*-nya. Jangan begitu banyaknya, padahal bahan bakar minyak terbatas," ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Bogor, Sabtu lalu. Aturan pasar SPBU ditargetkan selesai tahun ini dan dapat diterapkan pada 2008.

Saat ini hampir 60 persen SPBU ada di Pulau Jawa. Total SPBU 3.015 buah. Perinciannya, SPBU Pertamina sebanyak 3.000 buah, Shell 5 (dalam proses menuju 10), dan Petronas 5. Total dan Medco dalam proses perizinan membangun SPBU.

Menurut Ketua Kelompok Kerja Bahan Bakar Minyak untuk Analisa Kuota Dedy Wijaya, saat ini sejumlah SPBU yang berlokasi di Jakarta sudah mengalami penurunan laba. ● YULLAWATI

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR.DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

Hak Khusus Bakrie di Kalija Tidak Diputus

Proyek Pemipaan Gas Kalimantan-Jawa

- Pembukaan tender Desember 2005
- Sejumlah perusahaan mendaftar, di antaranya PT PGN Tbk, PT Bakrie Brothers Tbk, dan PT Rekayasa Industri
- 17 Juli 2006 Bakrie ditetapkan sebagai pemenang tender
- Total investasi US\$ 1,26 miliar
- Bakrie serahkan jaminan US\$ 1,26 juta (0,1% dari total investasi)
- Panjang transmisi pemipaan 1.115 KM
- Gas ditargetkan mengalir 3 Juli 2009
- Diperkirakan mengalirkan 700-1.000 juta kaki kubik gas per hari

BOGOR - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kemungkinan besar tidak akan memutus hak khusus pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Bon-tang, Kalimantan Timur menu-ju Semarang, Jawa Tengah (Kalija) yang dimiliki PT Bakrie & Brothers Tbk.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, sesuai kontrak yang ditandatangani Juli 2006, Bakrie memiliki waktu selama setahun (maksimum Juli 2007, **red**) untuk melakukan kegiatan pemba-ngunan.

"Mereka (Bakrie & Brothers) sudah melakukan kegiatan pem-bangunan yang dimaksud seperti survei, pembebasan lahan dan melakukan pende-katan dengan pemda setempat," katanya di sela sosialisasi BPH Migas di Bogor, Sabtu (9/6).

Dengan demikian, menurut dia, pihaknya tidak akan men-cabut hak khusus yang telah diberikan.

Saat ini, BPH Migas tengah melakukan sinkronisasi pem-bangunan pipa gas Kaltim-Ja-teng dengan ruas Semarang-Cirebon yang dimiliki PT Per-tamina (Persero) dan Gresik-Semarang milik PT Rekayasa Industri.

BPH Migas telah menetapkan Bakrie sebagai pemenang tender hak khusus Kaltim-Ja-

teng setelah perusahaan itu men-gajukan biaya pengangkutan (*tol fee*) gas paling rendah yakni US\$ 0,769 per juta *british ther-mal unit* (BTU).

Proyek pipa transmisi Kaltim-Jateng tersebut membent-ang sepanjang 1.219 kilometer dengan nilai investasi sekitar US\$ 1,26 miliar.

Pipa yang akan mengangkut 700-1.000 juta kaki kubik per hari (*mile mile standard cubic feet per day/mmscfd*) itu akan melalui Kuala Badak-Balikpa-pan (*onshore/darat*), Balikpapan-Banjarmasin (*onshore*), dan Banjarmasin-Semarang (*offshore/laut*).

Bakrie sudah menyerahkan uang jaminan senilai US\$ 1,26 juta atau 0,1% dari total inves-tasi ke BPH Migas.

Perusahaan tersebut juga telah menyiapkan 30% penda-naan dari kas internal. Namun, kendala yang kini dihadapi Bakrie adalah mencari gas yang akan dialirkan.

Pemerintah sudah menyata-kan tidak akan menjamin pasokan gas dan memberikan subsidi gas dalam proyek ter-sebut.

Kemungkinan besar, pasokan gas dari Kaltim baru dida-pat setelah pemerintah tidak memperpanjang sebagian kontrak ekspor gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) ke Jepang pada 2010-2011. (**pya**)

36

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	<u>JUN</u>	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 14											TAHUN 2007

China may halt coal-to-oil projects

China is considering halting efforts to make oil from coal due to con-

cerns about the expense and energy demands, a state news agency on Sunday quoted an official as saying.

China is hoping to ease its rising dependence on imported oil by promoting alternative energy sources such as oil-from-coal and solar, wind and nuclear power.

China "may put an end to projects which are designed to produce petroleum by liquefying coal," the official *Xinhua* said, citing an official of the country's top economic planning agency.

"Liquefied coal projects consume a lot of energy, though the successful industrialization of liquefied coal could help reduce the country's dependence on petroleum," the official of the National Development and Reform Commission was quoted as saying Saturday.

The official also expressed concern about the expense and water demands of such projects,

Associated Press
Beijing

Xinhua said.

Scientists also say the use of liquid coal could increase

the total amount of greenhouse gases released because pollutants would be created during production and by burning the fuel.

A report in April by the U.S. Environmental Protection Agency said use of liquid coal could lead to a 119 percent increase in greenhouse gases released per barrel of fuel if production and vehicle emissions were counted.

A U.S. environmental group, the National Resources Defense Council, in a report in February, put the increase at 85 percent.

The Chinese government announced plans in March to invest 100 billion yuan (US\$13 billion) to build Asia's largest facility to make diesel fuel from coal.

The facility in the northwestern region of Ningxia would be due to start operation in 2020 and be capable of producing 75 million barrels of diesel fuel a year, according to news reports.

ing into talks for exploration and production rights.

The government has divulged very little about these negotiations.

But companies from Thailand, Singapore, Malaysia, **Indonesia** and Kuwait, as well as China's state energy giant CNOOC, have all bid for rights in other blocks, said Te Duong Tara, executive director of the Cambodian National Petroleum Authority (CNPA), at a conference in February.

Since Chevron's announcement, the debate has largely focused on Cambodia's ability to manage its oil wealth.

The money could be used to repair infrastructure, or build schools and hospitals, said Sok Hach, president of the Economic Institute of Cambodia, a private think tank.

"I think it could be very, very helpful if it was managed well," he told *AFP*.

But the potential for a sudden influx of billions of dollars has some observers warning of disaster for corruption-plagued Cambodia.

Sok Hach agreed that there was "the dark side of the story"; Cambodia's weak governance and institutionalized graft that could see oil wealth simply devoured by the powerful.

Hun Sen has repeatedly vowed that oil would not become a "curse", referring to other poor countries like Nigeria whose resource riches have benefited only the elite.

The world's sixth largest oil exporter in 2005, Nigeria remains one of the poorest nations in sub-Saharan Africa and has "come to epitomize what can go wrong with oil wealth," according to the World Bank.

"The challenge for Cambodia will be to channel this new-found wealth through strong institutions, reinforcing the capacity of the state to collect and spend for the benefit of all Cambodians," said World Bank economist

Robert Taliercio.

But this is not easy in a country that has limped along under a system of political patronage, kickbacks and buy-offs.

Hun Sen's promises of oil sector transparency are also likely to be blunted by recent accusations from the forestry watchdog Global Witness that his relatives and other politically-connected families were plundering Cambodia's other key natural resource, timber, "with complete immunity."

Amid the uncertainties surrounding Cambodia's fuel sector, the Chevron project is an important indicator of whether foreign companies will be able to work with the government here, analysts say.

"The success of that project will be a hot test for other companies sitting on the sidelines," said Dave Ernsberger, Asia oil director at Singapore-based energy information giant Platts.

"How those partners fare with the national government, taxation, and ability to export and sell the crude oil and natural gas will be a key test for Cambodia," he added.

Ernsberger warned, however, that Cambodia should not leap into taxation and licensing agreements simply to attract investors, only to then try to strongarm a better deal for itself once oil has started flowing.

"There is a trend around the world for developing nations to aggressively renegotiate contracts," he told *AFP*.

Already, Hun Sen is urging donors to pressure oil companies to ink revenue sharing agreements that more heavily favor Cambodia.

But this tactic could backfire, according to Ernsberger.

"The issue for a country like Cambodia is that ... there is simply not yet the proven potential for gas and oil exports and track record of performance for many companies to tolerate that sort of behavior," Ernsberger said.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

Sumur Eksplorasi Gas RI Turun 50 Persen Lebih

Jumlah sumur eksplorasi gas alam mengalami penurunan drastis lebih dari 50 persen sejak sembilan tahun terakhir. "Di sektor hulu tidak ada penemuan lagi," kata pengamat perminyakan, Kurtubi, di Jakarta, Sabtu. Sebelum tahun 1998 jumlah eksplorasi sumur pemboran lebih dari 200 sumur. Angka tersebut mulai turun pada 1998 yang hanya mencapai 150 sumur. Penurunan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kurtubi mencatat pada tahun 1999 hanya terdapat 90 sumur pemboran, tahun 2000 terdapat 80 sumur pemboran, tahun 2001 terdapat 62 sumur pemboran, dan tahun 2003 hanya terdapat 36 sumur pemboran di Indonesia. "Angka tersebut mengalami peningkatan pada 2006 lalu menjadi 60 sumur pemboran," ujar dia.

Menurut Kurtubi, kurangnya pasokan LNG ke beberapa industri di tanah air terkesan bahwa cadangan gas alam di Indonesia sudah menipis. Padahal, persoalan utamanya karena dalam tujuh tahun terakhir tidak ditemukan cadangan gas baru.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

Govt considers opening up gasoline market

Ika Krismantari
The Jakarta Post/Puncak, Bogor

The government is considering revoking a subsidy for the sale of premium gasoline after 2009 to cut subsidy spending and to encourage new players to join the market.

To date, state oil and gas company PT Pertamina has enjoyed a monopoly on premium gas in Indonesia.

Head of downstream oil and gas regulatory agency BPH Migas, Tubagus Haryon, said over the weekend his agency had been drafting a proposal to let the price of premium gasoline currently sold by Pertamina fluctuate according to market prices.

He said the plan aimed to not only reduce the state's subsidy burden but to also help guarantee there would be no scarcity in the fuel because numerous companies would help provide the fuel.

However, he said the plan would likely not be implemented until after the next presidential election in 2009.

He said the current government had pledged not to increase the price of domestic fuels until the end of its term because it had increased

prices twice in 2005.

"What the government needs is political will," he said.

But Tabagus said he was aware the subsidy issue had always been a sensitive one — politically and socially.

The government today subsidizes the sale of premium gasoline, kerosene and diesel fuels used by motorists, households and small businesses. "We can look at India ... it has now eliminated the subsidy for premium and gasoline fuels and the government only subsidizes the sale of kerosene," he said.

According to this year's budget, the quota for subsidized fuel is 37.9 million kilo liters (kl). This is made up of 17 million kl of premium gasoline, 11 million kl of diesel and 9.9 million kl of kerosene — with a total budget of Rp 62.7 trillion (US\$6.9 billion).

In 2006, the government subsidized the same quota — 17 million kl of gasoline, 9.9

million kl kerosene and 11 million kl of diesel — a total of Rp 60.55 trillion.

Approximately Rp 42 trillion went to subsidize kerosene.

The government has been planning to gradually decrease the subsidy for fuel. It wants to reduce the budget's deficit, which this year is assumed to widen to 1.8 percent from 1.1 percent.

In order to sell subsidized fuel, a company must operate gas stations and supporting infrastructure facilities in two different regions.

The local arm of Royal Dutch Shell Plc., PT Shell Indonesia, is exploring the possibility of opening more gas stations outside Java and Bali after establishing 10 filling stations in Greater Jakarta.

Shell is the first foreign company to take on Pertamina in the country's tightly controlled retail gasoline market in 2006.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2007

Darwin Silalahi, Country Chairman dan CEO Shell Indonesia

Keseriusannya Menggarap Bisnis Shell Indonesia

Perusahaan minyak dan gas (migas) Belanda Royal Dutch Shell mempertegas keseriusannya menggarap bisnis hilir di Indonesia dengan mengangkat Darwin Silalahi sebagai Country Chairman dan CEO untuk Shell Indonesia. Darwin adalah orang Indonesia pertama yang duduk di tahta tertinggi kerajaan Shell. Bahkan mengubah nama perusahaan mitranya, yaitu PT Kridapetra Graha menjadi PT Shell Indonesia.

"Ini merupakan saat-saat yang menarik bagi Shell Indonesia. Banyak yang ditawarkan Shell pada Indonesia. Ini merupakan tantangan maupun peluang bagi saya sebagai Country Chairman dan CEO lokal yang baru," ujar Darwin.

Darwin Silalahi menggantikan Bob Moran yang telah menjabat sebagai Country Chairman di Indonesia selama tiga tahun. Shell juga meluncurkan "Safety Days 2007" di seluruh unit operasi Shell di seluruh dunia. Safety days digelar dari 5 Juni hingga 16 Oktober tahun ini.

Setelah membuka 10 SPBU di Jakarta, Shell yang melihat potensi besar di Indonesia, juga mengincar pasar di kota-kota besar lainnya di luar ibu kota negara ini. Meski rencana itu pada saat ini masih dalam tahapan pengkajian, namun Darwin mengaku optimistis segmen-segmen di industri hilir itu akan terbuka bagi pemain-pemain baru. "Tepatnya, apakah kami akan mengembangkan pasar di luar Jawa, sangat tergantung dari respons pasar," kata Darwin Silalahi.

Selain mencermati respons pasar, Shell seperti diungkapkan Darwin, juga masih akan mempertimbangkan beberapa parameter lainnya untuk merealisasikan rencana



Hendra/NERACA

Darwin Silalahi adalah orang Indonesia pertama yang duduk di tahta tertinggi kerajaan Shell.

pembukaan SPBU di luar Jakarta itu. "Tidak hanya memberikan pelayanan sesuai dengan standar global Shell, tapi juga menyangkut suplai dan distribusi bahan bakar dari Shell Jakarta ke stasiun tersebut. Kami akan melakukannya bersamaan dengan perbaikan infrastruktur lokal dan jalur distribusi."

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai detail berapa SPBU yang direncanakan akan dibuka dan berapa investasi yang akan dialokasikan untuk pembukaan SPBU di luar Jakarta ini.

Selain tertarik mengembangkan pasar di luar Jakarta, Shell sebagai salah satu pemain BBM non subsidi di Indonesia, Shell juga membidik bisnis pengembangan gas dari batubara atau CBM (*coal bed methane*) dan distribusi liquefied pe-

troleum gas (LPG). Namun dengan kondisi pasar saat ini, Shell memutuskan masih akan menunggu sampai kondisi pasar dinilai menguntungkan. Salah satu alasan ketertarikan Shell untuk turut serta dalam memasok LPG, yakni rencana pemerintah yang mencanangkan program konversi minyak tanah ke LPG.

Darwin Silalahi mengungkapkan, bisnis tersebut akan memiliki potensi yang baik di masa mendatang. Namun, kondisi pasar yang belum memungkinkan bagi ekspansi bisnis menyebabkan Shell menunggu momen yang tepat. Shell mengaku tertarik untuk turut serta dalam memasok LPG terkait program konversi minyak tanah ke LPG. "Bagaimanapun, yang menjadi penentu kami untuk masuk ke suatu sektor bisnis adalah adanya *level of playing field* yang sama," kata Darwin.

Shell tertarik masuk ke bisnis elpiji karena ingin mendorong program konversi minyak tanah ke bahan bakar itu. "Kami saat ini akan mengawasi pasar dan inisiatif yang dilakukan pemerintah. Manakala struktur pasarnya membantu kami untuk lebih efisien, kami akan menawarkan produk elpiji."

Namun, masih ada hambatan yang membuat Shell memutuskan untuk menunggu dulu. Hambatan yang masih ditemui Shell antara lain soal harga

L P G domestik.

Me -
nurut-
nya,
saat ini

harga LPG di pasar domestik, yaitu RP 4.250/kg masih dinilai belum ekonomis

"Kami masih mengamati kebijakan pemerintah untuk hal ini. Kami akan masuk bila struktur pasar menguntungkan, dimana semua pelaku diberi kesempatan yang sama. Selain itu juga masalah *pricing*," ujarnya.

Sedangkan untuk CBM, menurut Darwin Shell saat ini statusnya juga masih dalam peninjauan sebagai salah satu sumber energi non konvensional yang dinilai berpotensi besar di Indonesia.

"Ketertarikan Shell di CBM adalah bagian dari sumber energi non konvensional yang kita tertarik untuk melihat kesempatan yang material, kami akan sangat tertarik untuk ini dengan mengandalkan kemampuan kami di bidang teknologi dan di bidang manajemen keuangan. Namun untuk lokasi kita enggak bisa *disclosed*," ujarnya.

Namun, dengan kondisi pasar saat ini yang masih sangat terbatas, Shell memutuskan masih akan menunggu. Hambatan lain yang masih ditemui Shell antara lain soal harga LPG domestik. Shell adalah perusahaan internasional yang beroperasi di 140 negara dengan jumlah karyawan tercatat sebanyak 109.000 orang. Shell lebih dikenal masyarakat untuk produk pelumasnya. Di Indonesia, Shell sejauh ini sudah memiliki 10 SPBU di Jakarta dan sekitarnya.

(Nadia L. Nihayati)

41

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

PICU PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI

BPH Migas Minta Produksi *Octane Booster* Dihentikan

Hans Geeno
NERACA

Bogor - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghimbau agar produksi maupun impor *octane booster* (bahan pencampur BBM) dihentikan. Adanya produk itu dinilai memicu penyalahgunaan BBM subsidi.

"Octane booster sering digunakan untuk meng-up grade kandungan oktan di bahan bakar minyak. Jadi misalkan premium yang berkadar oktan 88 jika dicampur dengan *octane booster* bisa berkadar oktan 90 alias Pertamina," ungkap Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam sosialisasi

fungsi BPH Migas di Bogor, pekan lalu.

Menurut Tubagus, kecanggihan ini justru membuat banyak pemilik kendaraan mewah yang seharusnya tidak menerima subsidi jadi ikut menikmatinya. Pasalnya, mereka malah membeli premium (BBM subsidi) walau kendaraannya berkualifikasi Pertamina yang harganya lebih mahal.

Tubagus menilai, karena kualifikasi kadar oktan dapat diakali dengan *octane booster* tadi. Subsidi yang seharusnya untuk rakyat menengah bawah jadi berkurang karena juga dikonsumsi oleh kalangan menengah atas.

"Makanya saya bikin per-

nyataan, *octane booster* itu dihentikanlah diproduksi. Karena tidak sejalan dengan program mengurangi subsidi," ujarnya.

Namun hingga kini ia mengaku belum menyampaikan permintaannya secara resmi pada departemen terkait, yaitu departemen Perdagangan dan Perindustrian.

Tubagus juga mengatakan pemerintah Indonesia perlu belajar menjual BBM dari India. Di India, katanya, BBM sejenis premium tergolong BBM yang tidak disubsidi. Sehingga beban subsidi pemerintah jadi lebih ringan.

"Tadi baru ide, belum siap resmi BPH Migas. Bagaimana kalau misalkan BBM

RON (*real octane number*) 88 dilepas ke mekanisme pasar," ujarnya.

Selain mengurangi beban subsidi pemerintah, juga bisa membantu keamanan suplai di daerah. Karena pelaku bisnis akan terus mencari daerah mana yang bisa dipasok kebutuhannya.

"Badan usaha akan memenuhi daerah mana yang mengalami kekurangan. Jadi supply dan demand. Jadi bisa teratasi. Cuma butuh political will," ujarnya.

Tubagus menjelaskan, itu karena sistem kenegaraan di India memungkinkan untuk melepas harga premium ke pasar.

"Mereka sistem negara-

nya beda, mereka negara bagian yang sangat otonom menentukan pajaknya sendiri, harga sendiri," katanya.

Sedangkan untuk minyak tanah, kontrol harganya masih dipegang pemerintah karena volume kebutuhannya masih banyak.

Kontrol minyak tanah di negara India ini menggunakan kartu kendali. Setiap Kepala Keluarga dijatah sekian liter dan tidak bisa lebih.

Sistem ini memang agak sulit untuk diterapkan di Indonesia karena kemampuan beli masyarakat untuk premium dan minyak tanah masih rendah sehingga masih butuh subsidi pemerintah. ●

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2007

Petronas Masuk Bandung

DALAM menggarap bisnis BBM-nya di Indonesia, Petronas tampaknya ingin bergerak cepat. Setelah membangun sejumlah SPBU di Jakarta, kali ini giliran Bandung yang menjadi sasaran. Rencananya, di Kota Kembang itu akan dibangun 10 SPBU. Dandan Reza Wardana, Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah (KPM) kota Bandung mengatakan, gergasi bisnis asal Malaysia itu sudah mengajukan izin ke pemerintah kota. Namun, belum ditentukan di lokasi mana saja SPBU itu akan

dibangun.

Soalnya, kata Dandan, standar lahan yang ditetapkan Petronas cukup luas, minimal 3.500 m2 untuk setiap SPBU. Maklum, selain pompa-pompa untuk mengisi BBM, SPBU-SPBU itu juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti usaha ritel dan *food court*. "Konsep ini bisa dikatakan plus. Selain mengisi BBM, konsumen nanti bisa melakukan *shopping* di area SPBU itu," paparnya.

Sesuai revisi UU No. 22/2001, perusahaan asing diperbolehkan untuk menjadi operator penyedia bahan bakar dalam negeri. Dan



TRUST/SUTIKNO

lantaran pasar Indonesia cukup besar, sejumlah investor pun langsung berebut terjun ke bisnis ini.

Ini jelas merupakan aba-aba bagi Pertamina untuk segera membenahi usaha pompa-pompa bensinnya. Sebab, kalau tidak, posisinya tak lama lagi bakal digantikan oleh SPBU-SPBU dari mancanegara. □

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

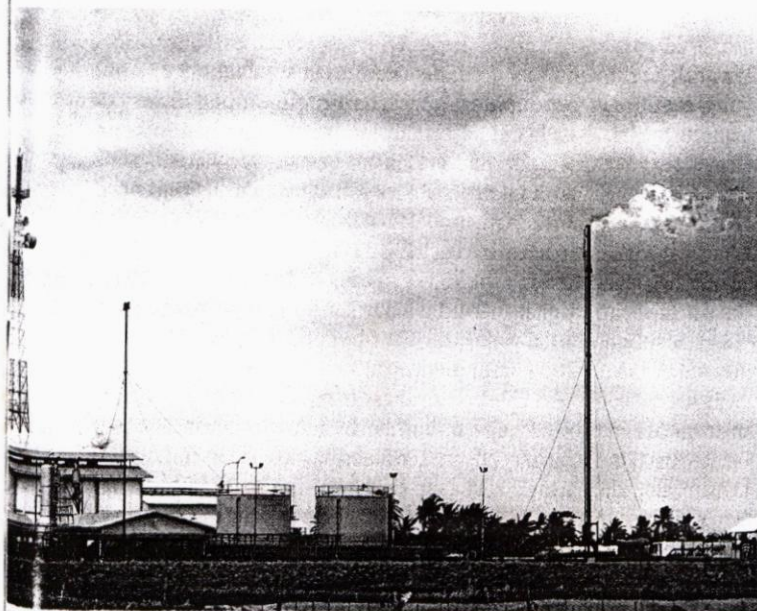
GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

Tak Mau Disalahkan



MONOPOLI, terbukti, tak selalu identik dengan keuntungan. Contohnya Pertamina. Meskipun menguasai penjualan gas elpiji di seantero negeri, perusahaan pelat merah itu justru mengaku tekor berat. Menurut Ari Soemarno, Dirut Pertamina, sampai pertengahan tahun 2007 Pertamina diperkirakan merugi Rp 1,5 triliun dari bisnis elpiji. Penyebabnya, BUMN ini masih menjual elpiji seharga Rp 3.800 per kilogram kepada agen. Sementara di pasar internasional harganya sudah menembus Rp 7.000 per kilogram.

Jika kondisi ini terus berlangsung, Ari memperkirakan, jumlah kerugian dari bisnis ini akan meningkat. Tahun lalu saja, kerugian dari dagang Elpiji mencapai Rp 2,9 triliun.

Jadi, akan dinaikkan? Maunya sih begitu. Tapi, kata Ari, kebijakan harga elpiji merupakan hal yang sensitif. Dan soal harga sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Jadi, kalau pemerintah tak mau menaikkan, Pertamina tak bisa berbuat apa pun. Itu sebabnya, nakhoda BUMN paling tajir ini meminta agar pemerintah tidak melihat kerugian yang terjadi pada bisnis elpiji sebagai akibat buruknya kinerja direksi Pertamina. □

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input checked="" type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN: 28											TAHUN 2007

BBM

Dagang Minyak di Tengah Laut

Bumi Asri Prima Pratama menggandeng Humpuss Intermoda Transportasi untuk berbisnis BBM di tengah laut. Sayangnya, perusahaan pelayaran nasional masih senang membeli BBM di luar negeri.

Dikky Setiawan, Wisnu Arto Sobari, dan Intan Rahmawati

JUALAN minyak memang *gak* ada matinya. Lihat saja, konsumsi BBM nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006, konsumsi BBM baru sekitar 37 juta kiloliter. Tahun ini, angka itu diperkirakan akan menembus 39 juta kiloliter.

Makanya, jangan heran, jika banyak pemodal berbondong-bondong masuk ke bisnis pendistribusian BBM. Mereka bahkan tak hanya berjualan di darat, tapi juga di tengah laut. PT Bumi Asri Prima Pratama (BAPP), misalnya. Awal Mei silam, perusahaan ini memulai debutnya di bisnis pengisian bahan bakar kapal (pengisian bunker) di tengah laut.

Atoek Koesmoeryantati, Direktur Utama BAPP, mengaku telah mengucurkan dana investasi Rp 17 miliar. Dana sebesar itu, antara lain, dipergunakan untuk menyewa empat kapal tanker milik PT Humpuss Intermoda Transportasi—yakni Kapal Catur Samudra yang memiliki kapasitas angkut sebesar 4.300 kiloliter, Eka Samudra (3.600), Dwi Samudra (2.400), dan Tri Samudra (2.200).

Dengan kapal sewaan tersebut, lanjut Atoek, BAPP akan me-

layani pendistribusian solar untuk kapal yang melewati jalur di tiga pelabuhan: Tanjung Priok, Karimun, dan Belawan. Eloknya, kendati usahanya baru berjalan, Atoek sudah berani memasang target bahwa perusahaannya mampu menjual bahan bakar—solar dan minyak bakar—hingga 5.000 ton per bulan. "Kami yakin target itu bisa tercapai," ujarnya penuh semangat.

Atoek layak merasa optimistis. Toh, pasar BBM di laut memang cukup besar. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, kebutuhan BBM bagi kapal perikanan tangkap mencapai 2,1 juta kiloliter. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan BBM bagi kapal lain. Sebut saja, misalnya, kapal penumpang, kargo, dan batu bara. Syahdan, bahan bakar yang dipasok industri bunker mencapai 14 juta kiloliter per tahun. Hampir seluruh BBM itu dipasok oleh Pertamina.

Bisnis layanan bunker memang punya peluang besar. Soalnya, kebanyakan kawasan negeri ini adalah laut. Tentunya, banyak kapal yang melintasi kawasan perairan tersebut—dan kapal-kapal itu tentu membutuhkan bahan bakar. Padahal, pemain lokal yang bergerak di bisnis ini belum cukup banyak. Selama ini, layanan bunker untuk kapal nasional—terutama kapal niaga—banyak dilakukan di Singapura.

Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan, juga mengatakan, potensi bisnis "SPBU laut" memiliki prospek bagus. Indonesia—negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau—juga memiliki 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kebanyakan kapal yang melintas di perbatasan itu mengisi BBM-nya dari negara tetangga. Freddy memberi

45

contoh nelayan di pulau Tarakan (Kalimantan Timur) yang kerap membeli bahan bakar di Malaysia.

Itu sebabnya, ujar Freddy, bisnis "SPBU laut" juga akan bermanfaat untuk menghemat devisa negara. Betul, untuk menjaga ketersediaan bahan bakar di pulau terluar, pemerintah telah membangun *solar packed dealer nelayan* (SPDN), atau stasiun bahan bakar nelayan, sebanyak 140 unit di pulau-pulau terluar. Sayangnya, untuk membeli BBM itu, para nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Soalnya, SPDN lazimnya berada di ibu kota kabupaten. Freddy berharap, ke depan, ada stasiun pompa bahan bakar dengan model tongkang bergerak di setiap kabupaten kepulauan.

Jadi, misalnya, para nelayan di Kepulauan Raja Ampat, Papua, tak perlu datang lagi ke Sorong untuk membeli bahan bakar kapalnya. "Dengan model ini, biaya yang dikeluarkan nelayan juga akan menjadi lebih rendah," ujar Freddy.

Harapan Freddy mungkin saja akan terlaksana. Soalnya, perusahaan seperti BAPP ternyata juga berminat melakukan bisnis BBM dengan nelayan. "Nantinya, selain mendistribusikan BBM untuk kapal niaga, kami juga akan melayani kebutuhan kapal ikan," kata Atoek.

BBM ASING MASIH LEBIH OKE

Erie Soedarmo, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Departemen ESDM, mengatakan, pendistribusian BBM di laut bisa memperlancar roda perekonomian di pulau-pulau terluar. Apalagi, jika yang dijalankan adalah sistem pemasaran bergerak (*mobile*). Bagi konsumen, cara itu akan lebih efisien ketimbang harus mengisi bahan bakar di depo-depo yang ada di pelabuhan. Para nelayan dan perusahaan pelayaran juga tak perlu datang lagi ke pelabuhan tempat kapal pengangkut BBM bersandar. "Mereka tak perlu lagi mengantre di pelabuhan," katanya.

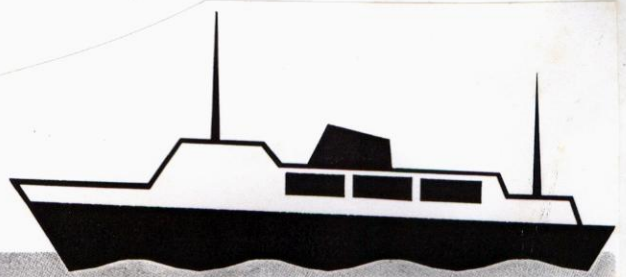
Bagi perusahaan seperti BAPP sendiri, lanjut Erie, pola seperti itu juga akan menghemat biaya operasional. Sebab, mereka jadinya tak perlu membayar biaya sandar kapal pengangkut bahan bakar.

Kalau semua itu terwujud, maka harga BBM laut akan menjadi lebih murah. Selama ini, harga BBM laut di kawasan kita lebih mahal dibandingkan harga jual di bunker yang berada di Malaysia atau Singapura. Sekadar informasi, saat ini, harga jual solar di dalam negeri rata-rata sekitar Rp 4.500-Rp 6.000 per liter—lebih mahal 25% ketimbang harga di kedua negeri jiran tadi. Jojok Moedji, Ketua Asosiasi Pelayaran Bunker Indonesia (APBI), menuturkan, kualitas bahan bakar di sana juga lebih baik.

Akibatnya, banyak konsumen memilih belanja di Singapura dan Malaysia. Devisa miliaran dolar pun setiap tahun terpaksa melayang ke dua negeri jiran tersebut. Padahal, di beberapa pelabuhan utama Indonesia, fasilitas bunker kapal telah tersedia meski belum dimanfaatkan secara optimal.

Djoni Sutji, Direktur Operasi Pelayaran PT Tempuran Emas, sependapat dengan Jojok. Ditambah lagi, ujar Djoni, banyak perusahaan pelayaran nasional yang membeli BBM di luar negeri karena mereka telah mengantongi kontrak global dengan pemasok bunker di sana. Selain itu, sosialisasi layanan bunker di dalam negeri masih kurang.

Menurut Jojok, hingga saat ini baru kapal ukuran kecil dengan rute antarpulau dan kapal milik BUMN yang memanfaatkan layanan bunker di pelabuhan Indonesia. Sayangnya, memang,



Kebutuhan BBM Kapal secara Nasional

Klasifikasi	Ukuran Kapal	Jumlah Kapal (unit)		Estimasi Kebutuhan Kapal/Th (liter)	Total Kebutuhan Nasional (kiloliter)	
		2005	2006		2005	2006
Skala Kecil	Perahu Motor Tempel (PMT)	164,230	167,140	2,304	378,386	385,089
	KM < 5 GT	82,330	83,886	3,600	296,388	301,990
	KM 5 - 10 GT	26,170	27,076	4,800	125,616	129,965
	KM 10 - 20 GT	6,010	6,133	12,800	76,928	78,502
	KM 20 - 30 GT	3,520	3,715	16,320	57,446	60,621
Skala Besar	KM 30 - 50 GT	2,630	2,776	64,800	170,424	179,885
	KM 50 - 100 GT	2,720	2,731	120,960	329,011	330,342
	KM 100 - 200 GT	1,750	1,760	219,520	384,160	386,245
	KM > 200 GT	620	631	442,453	274,321	278,967
Total		289,980	295,848		2,092,680	2,131,606

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan.



KUCURKAN RP 17 MILIAR DI BISNIS INI

Padahal, konsumsi bahan bakar kapal di Tanah Air terus meningkat. Sejak Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional diterbitkan, kata Jojok, volume pasokan bahan bakar kapal naik rata-rata 25% per tahun.

Bahkan, pada 2010, kebutuhan itu diperkirakan meningkat empat kali lipat. Oleh sebab itu, kata Jojok, eksistensi usaha bunker kapal nasional akan terancam jika pemain multinasional ikut menggarap layanan sejenis di dalam negeri. Selama ini pula, ujar Jojok, banyak perusahaan multinasional yang meminta bantuan anggota APBI untuk memasarkan produk mereka. "Mestinya pemerintah memproteksi usaha layanan bunker nasional," ujarnya.

Sayang, harapan Jojok tampaknya hanya akan menjadi harapan belaka. Para pemain asing tetap akan berkibar di bisnis ini. Bahkan, BBM yang dijual Bumi Asri Prima Pratama pun dipasok oleh sejumlah perusahaan minyak asing. "Kami menerima pasokan dari Petronas, BB Energy, dan KemOil," ujar Atoek Koesmoeryantati. □

45

getkan sudah bisa dimulai pada akhir tahun ini.

"Secepatnya setelah proses di laboratorium selesai, kami mengharapkan bisa dilakukan di lapangan," kata Luhfi.

Masuk rencana anggaran

Menurut Luhfi, Chevron sudah memasukkan proyek percontohan senilai 200 juta dollar AS itu dalam rencana anggaran kerja tahun ini. "Apabila dalam 2-3 tahun hasilnya bagus, tahun 2011 sudah bisa dilakukan dalam skala proyek penuh," ujarnya.

Namun, pengamat perminyakan, Kurtubi, mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati

karena proyek percobaan itu memakan biaya yang tidak sedikit.

"Sebagai upaya peningkatan produksi, proyek EOR Chevron itu bisa diterima. Namun, harus jelas syarat-syarat apa yang diminta Chevron sebab, menurut Undang-Undang Migas, lapangan di Blok Sumatera Tengah sudah tidak bisa diperpanjang lagi," tutur Kurtubi.

Dengan selesainya kontrak, lanjutnya, Lapangan Minas dan Duri harus dikembalikan ke negara. "Maka, perlu kehati-hatian, jangan sampai produksi minyak dari lapangan itu habis hanya untuk *cost recovery*," kata Kurtubi. (DOT)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 48

TAHUN 2007

Biofuel, Simalakama Penduduk Dunia

OPEC memperingatkan, gencarnya kampanye penggunaan biofuel bisa membuat harga minyak dunia tak terkendali. Bahan bakar terbarukan itu juga dituduh meningkatkan harga pangan dan memperparah kerusakan hutan di Asia.

A. Reza Rohadian

DIMAKAN ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Seiring dengan membungunya harga bahan bakar dan upaya memangkas emisi karbon, masyarakat dunia pun ramai-ramai melirik biofuel sebagai alternatif si emas hitam. Di sisi lain, upaya menggenjot produksi energi hijau yang begitu kuat didukung-dukungkan pada perhelatan G-8 (delapan negara industri terkemuka) di Heligendamn, Jerman, pekan-pekan ini, telah membuat negara-negara produsen minyak sakit hati. Kepada *Financial Times*, Sekretaris Jenderal OPEC (Organisasi Nega-

ra-Negara Eksportir Minyak) Abdella El-Badri, mengingatkan, gencarnya kampanye penggunaan biofuel bisa membuat harga minyak dunia tak terkendali.

Alasan yang dikemukakan El-Badri, negara-negara anggota OPEC sebagai pemasok 40% kebutuhan minyak dunia akan berpikir dua kali untuk menanam investasi baru pada pencarian ladang minyak anyar. "Bila tidak mendapatkan jaminan akan permintaan (minyak), investasi jangka panjang bisa kami tinjau ulang," sahutnya, Rabu pekan lalu.

Bukan hanya itu, biofuel yang digembar-gemborkan lebih bersahabat dengan lingkungan hidup, menurut sejumlah pakar, justru akan memperparah aksi pengundulan hutan tropis dan membuat harga pangan menjadi mahal.

Untuk pembabatan hutan, para ahli memberi contoh, banyak terjadi di Asia. Menurut pengamatan mereka, pelakunya adalah industri-industri besar yang selama ini memproduksi minyak goreng, sabun, sampo, dan bahan baku industri. Nah, kini, dalam rangka ambil bagian dalam pembuatan biofuel, perusahaan-perusahaan itu dikabarkan kian gencar memabat hutan demi membuka lahan perkebunan kelapa sawit.

Lalu, di Meksiko, harga jagung yang notabene salah satu kebutuhan pokok rakyat Negeri Sombbrero pun membubung. Penyebabnya, apa lagi, kalau bukan industri biofuel yang memborong jagung sebagai bahan baku pembuatan etanol (lihat boks: *Makanan Mahal, Hutan Gundul*).

Begitulah, tingginya kebutuhan akan bahan bakar, telah memaksa penduduk dunia menelan buah simalakama. Terlepas dari itu, cukup pantas juga jika OPEC mencakmencak. Bukan apa-apa, selama ini negara-negara industri terkemuka merupakan konsumen bahan bakar terbesar di kolong langit, terutama Amerika Serikat (AS). Rencana AS untuk memangkas konsumsi bensin hingga 20% dalam 10 tahun ke depan diperkirakan mampu mengurangi kebutuhan bahan bakar bagi kendaraan hingga 15%. Sebab, 5% kebutuhan itu bisa ditutupi dengan energi terbarukan. Pemotongan sebesar 20% itu setara dengan 75% impor minyak yang selama ini dilakukannya dari Timur Tengah.

AS memang tidak main-main dengan rencana itu. Sebelumnya, tepatnya akhir Maret lalu, Washington yang membutuhkan sedikitnya

47

dana sebesar US\$ 3,6 miliar untuk riset dan pengembangan biofuel, meneken kerja sama dengan Brazil. Sebagaimana diketahui, Negeri Samba merupakan pelopor penggunaan energi alternatif, khususnya etanol. Tahun lalu, AS mengimpor 650 juta galon etanol dari Brazil.

BUSH TETAP MENOLAK PROTOKOL KYOTO

Selanjutnya, pada Kamis dua pekan lalu, untuk pertama kalinya Presiden



ABDELLA EL-BADRI

George W. Bush Jr., menyampaikan rencana jangka panjangnya dalam mengurangi gas rumah kaca kepada publik. Dalam pernyataan yang disampaikan guna menyambut pertemuan G-8 itu, ia juga mengajak 14 negara dengan tingkat polusi paling tinggi untuk bergabung memerangi perubahan iklim. Ia pun berniat menggelar serangkaian pertemuan guna membicarakan target global dalam mereduksi gas rumah kaca pada akhir 2008.

Tapi, itu tidak berarti Sang Adikuasa yang memberi kontribusi 25% terhadap emisi gas rumah kaca dunia telah luluh dan bersedia mematuhi Protokol Kyoto (Protokol PBB untuk memerangi dampak pemanasan global) yang akan berakhir tahun 2012. Energi alternatif semata-mata dibutuhkan untuk mengatasi kecanduan AS terhadap minyak. Singkat kata, antusiasme AS terhadap biofuel dilandasi oleh alasan kepentingan ekonomi dan keamanan energi. "Negara kita telah lama tergantung dengan minyak asing," ujar Bush. "Ini sangat mudah diserang oleh negara-negara yang tak bersahabat dengan AS dan para teroris."

Alhasil, jangan harap pertemuan G-8 bakal menghasilkan konsensus tentang cara mencegah perubahan iklim yang begitu berbahaya. Uni Eropa (UE) dan AS masih

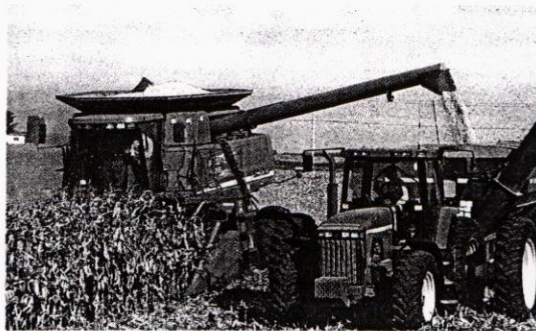
memiliki pandangan yang sungguh berbeda. UE yang bertekad meningkatkan penggunaan biofuel dua kali lipat pada 2020, mematok target untuk mencegah peningkatan suhu setinggi 2 derajat Celsius. Caranya, dengan memangkas emisi karbon dioksida sebanyak 50%. Kalau tak ada aral melintang suhu di bawah level tahun 1990 itu akan tercapai pada 2050. Sedangkan Bush menyatakan akan tetap memanfaatkan kekuatan teknologi dalam melindungi lingkungan hidup. Untuk itu, ia berjanji

meningkatkan penggunaan listrik yang terbuat dari sumber-sumber bebas karbon, seperti angin, tenaga matahari, dan nuklir.

Kesimpulannya, kita harus siap-siap menanggung tingginya harga bahan bakar. Bila negara-negara OPEC benar-benar enggan membenamkan investasi baru, harga minyak dunia tentu akan kembali meroket. Ini jelas merupakan amunisi bagi pemerintah Indonesia untuk kembali menaikkan, eh, menyesuaikan harga si hitam nan licin. Gawat! □

MAKANAN MAHAL, HUTAN GUNDUL

SAH-SAH saja jika saat ini biofuel dijagokan sebagai energi alternatif. Masalahnya, menurut sejumlah ahli biologi, lahan yang ada saat ini tak mungkin menyuplai kebutuhan akan energi dan pangan secara bersamaan. Maklum, gara-gara bahan pangan dipakai pula sebagai bahan baku biofuel, harganya langsung melambung. Itulah fakta yang terjadi di Meksiko. Akibat tingginya harga jagung yang merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat Negeri Sombro, kerusakan sempat meruyak.



HARGANYA MELONJAK 2 KALI LIPAT DI AS

Di benua Amerika, jagung memang sedang menjadi primadona. Di Bursa Komoditi Chicago, harga jagung telah melonjak dua kali lipat sejak tahun lalu. "Kami menggunakan 20% jagung kami untuk pembuatan etanol," sahut Roy Huckabay, salah seorang praktisi bursa komoditi dari Linn Group, seperti dikutip *BBC News*.

Dalam rangka memangkas kebutuhan bahan bakar impor, Presiden AS George W. Bush Jr. pun mendorong para petani untuk menanam jagung

dengan memberi subsidi. Para petani jelas menyambutnya dengan antusias. Salah satunya adalah Sam Martin. Petani asal Illinois yang memiliki 19.000 hektare tanah itu, selama ini memang telah memanfaatkan sebagian lahannya untuk menanam jagung. Pada musim semi tahun ini ia berniat meningkatkan jumlah lahan yang bakal ditanami jagung. "2007 bakal menjadi tahun yang sangat indah," katanya optimis.

Tapi, seperti yang terjadi di Meksiko, meningkatnya harga jagung juga bisa berdampak negatif. Selama ini, selain untuk pakan ternak, jagung dikenal sebagai bahan baku bagi produsen makanan, seperti *corn flakes*. Tak heran, jika produsen makanan memperingatkan tingginya harga jagung bisa membengkakkan anggaran belanja kebutuhan pokok masyarakat. "Saya pikir, makanan murah sudah menjadi sejarah," tutur Sam Martin.

Cukup? Biofuel juga diyakini memberi kontribusi pada perusakan hutan. Demi menanam kelapa sawit—salah satu bahan baku biofuel—menurut pengamatan para pakar lingkungan, perusahaan-perusahaan besar di Asia Tenggara tega memabat hutan. Namun, sinyalemen ini tentu saja disanggah oleh para pelaku usaha tersebut. Mereka bilang, lahan yang mereka gunakan sudah ditebang sejak lebih dari lima tahun silam. □